

# Pengelolaan Wisata model Pentahelix Bukit Soeharto

Vol 5 Issue 1  
(April, 2021)

**Dian Meilinda Puspitawati<sup>1</sup>, Robby Darwis Nasution<sup>2</sup>,  
Bambang Widiyahseno<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas  
Muhammadiyah Ponorogo

Email: dianmeilindapuspitawati@gmail.com<sup>1</sup>,  
darwisnasution69@gmail.com<sup>2\*</sup>, bbwidiyahseno@umpo.ac.id<sup>3</sup>

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

### Keywords:

Pentahelix Model; Tourism  
Management, Collaboration;

### How to Cite:

APA Style 7th

## ABSTRACT

This study aims to find out to describe the pentahelix model in the management of Soeharto Hill tourism in Biting Village, District, Badegan, Ponorogo Regency and what factors influence pentahelix model in managing the potential of Soeharto Hill in Biting Village, District, Badegan, Ponorogo Regency I recommend this descriptive type model in designing the problem formulation and research hypotheses. The type of research can be clarified based on the purpose, and the level of naturalness of the object studied by the researcher. The data collected is not in the form of numbers, but the data comes through descriptions in the form of written or spoken words from the people being observed. In this study, it will describe the use of waste to see the root of the problem so that it will be easier for researchers to get the data needed. The results of this study are the collaboration process between Perhutani, villages and foundations is carried out with Multi-Collaborative Governance in Bukit Soeharto Tourism Management. facilities in the tour of the suharto hill by agreement. One example is that the facility is built by a third party but is also operated by the private sector for a certain period of time in accordance with a mutually agreed contract agreement. Perhutani through lmdh with 3rd party manager of Soeharto Hill, 30% perhutani, 10% village, 60% developer. Obstacles to the management of the Soeharto Hill tourism during the Covid-19 period, income for hill managers decreased and also the distribution of results was less evenly distributed.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>  
Copyright (c) 2021 by IJGCS



## 1. Pembahasan

Pada masa pandemi Covid-19 ini, Ponorogo memunculkan wisata alam baru yakni Taman Bukit Soeharto. Objek wisata yang baru diluncurkan pada akhir Desember tahun 2020 ini, terletak di Kecamatan Badegan. Untuk ke lokasi tersebut, memerlukan waktu sekitar 25 menit dari kota Ponorogo menuju ke arah barat atau kurang lebih jaraknya sekitar 18 kilometer. Selain menyuguhkan keindahan alam yang cantik, asri dan masih alami, wisata yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah itu ternyata menyimpan nilai sejarah. Seperti namanya, bukit ini pernah dikunjungi oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. The Smiling General julukan Soeharto membangun monumen diatas bukit, sebagai tanda dirinya pernah singgah, (<https://beritajatim.com/gaya-hidup/bukit-soeharto-wisata-alam-sarat-sejarah-di-ponorogo/>).

Pengelolaan atau pengembangan kegiatan wisata sangat diperlukan dalam rangka menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata dan bagaimana wisatawan membelanjakan uang sebanyak-banyaknya. memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi dirangkaikan dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. begitu juga Kabupaten Ponorogo yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya Tarik wisata, Lokasi wisata satu ini berada di Desa Biting, Kecamatan Badegan. Bukit Soeharto Ponorogo ini berada di petak 137 a,b,c wilayah Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Badegan.

Sejak Oktober 2020, muncul ide untuk menjadikan Monumen Bukit Soeharto sebagai wisata rintisa. Pihak Perhutani bersama Pemerintah Kecamatan Badegan, Pemerintah Desa Badegan dan Biting sempat melakukan pertemuan untuk membahasnya dan sekarang sedang dalam tahap renovasi dan pembangunan.

Kolaborasi diatas yang dimaksud ialah dalam penelitian ini yakni kerjasama atau kolaborasi pariwisata yang terjalin antara Koperasi Jaya Mandiri Sejahtera dengan Perhutani dalam pengelolaan pariwisata Bukit Soeharto. Dalam menjalin kolaborasi atau kerjasama hal yang perlu diperhatikan ialah harus adanya MoU, dimana didalam sebuah MoU terdapat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang dapat dijadikan sebagai patokan, serta sebagai payung hukum dalam proses kolaborasi maupun kerjsama yang terjalin. Dengan adanya kolaborasi atau kerjasama ini dapat saling menguntungkan satu sama lain dari kedua belah pihak atau lebih yang berkomitmen untuk kerjasama, dengan demikian dengan adanya kolaborasi atau kerjasama akan lebih membantu dalam menjalankan sebuah usaha maupun kegiatan yang lain.

Kabupaten Ponorogo memiliki kawasan andalan dalam sektor pariwisata berbasis pariwisata alam yaitu Bukit Soeharto, yang terletak di atas tanah milik perhutani, tepatnya di Desa Badegan Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Wisata Bukit Soeharto dikelola oleh Koperasi Jaya Mandiri Sejahtera dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan perhutani yang memiliki lahan, tentunya dengan adanya wisata yang ada di lahan milik perhutani pasti ada kerjasama atau kolaborasi yang terjalin antara Koperasi dengan pihak perhutani sendiri, Bukit Soeharto juga sebagai pengelolaan konservasi alam, pariwisata, penelitian, serta Pendidikan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (*Cintantya Adhita Dara Kirana, Rike Anggun Artisa, 2020*) Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan desa wisata berbasis collaborative governance di Kota Batu. Berkembangnya paradigma pembangunan dimana pemerintah bukan lagi menjadi satu-satunya aktor dalam pembangunan membawa pengaruh pada pengelolaan desa wisata. Peneliti berupaya melihat peran aktor dan kerjasama sehingga membentuk sebuah kolaborasi dalam pengembangan desa wisata. Metode yang digunakan adalah metode eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Adapun dalam pelaksanaan multicollaborative governance tersebut, dibutuhkan komunikasi yang efektif guna memudahkan para aktor melakukan kolaborasi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan desa wisata. Dari uraian tersebut sangat menarik untuk diteliti bagaimana pengelolaan wisata bukit Soeharto dilihat dari kacamata *model pentabelix*. Selain itu juga menarik untuk dilihat Apa sajakah hambatan yang mempengaruhi *model pentabelix* dalam pengelolaan potensi bukit soeharto di Desa Badegan, Kecamatan, Badegan, Kabupaten Ponorogo.

## 2. Metode

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistic dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata secara alamiah dan memanfaatkan metode alamiah. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis dan tidak memerlukan angka-angka, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. (Moleong, 2011)

Lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilaksanakan wisata Bukit Soeharto di Desa Biting, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Alasan memilih Desa Biting sebagai lokasi penelitian adalah karena Desa Biting banyak potensinya dan baru pertama kali ini mendapatkan program dari kementerian desa dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata alam edukasi. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan banyak pihak yang bekerjasama dalam merintis wisata buatan ini. Dalam penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan dengan mempertimbangkan orang-orang yang layak dijadikan informan. Pemilihan informan merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat karena mengkaji tentang pembangunan dan pengembangan desa wisata alam edukasi di Desa Badegan Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, maka memutuskan informan adalah :

1. KJMS : 1 orang.
2. Kepala Desa Badegan : 1 orang.
3. Pihak Perhutani : 1 orang.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi. Disini peneliti akan menggabungkan dua macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Analisis data dasarnya merupakan proses menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, biasanya menggunakan statistik. Setelah data dianalisa dan informasi yang lebih sederhana diperoleh, hasilnya diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman, model analisa data disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014).

### 3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum mengadakan perjanjian yang mengikat masing-masing sudah saling bekerjasama yaitu: Contoh antara Perum Perhutani KPH Madiun dengan LMPSDH (lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan) Wono Subur Lestari sejak lama dan telah berdiri berdasarkan Akte notaris nomor 51 tanggal 29 April 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Antarkum Purwaningrum SH, M.Hum, M.KN, Notaris di kabupaten Ponorogo, dan penetapan Ketua LMPSDH di lantik oleh Kepala Desa Badegan Kecamatan Badegan, di sini LMPSDH mempunyai Wilayah Wengkon/areal kerjasama yang di tuangkan dalam PKS (Perjanjian kerjasama) bidang usahanya bahwa dalam perjanjian tersebut anggota LMPSDH mempunyai hak dan kewajiban, diantaranya kewajiban ; menanam tanaman kehutanan, Merawat Tanaman Hutan, Ikut serta Mengamankan Hutan dan Hak nya diantaranya menanam tanaman pertanian di lahan hutan yang diperbolehkan, menjadi tenaga kerja saat bidang kehutanan membutuhkan seperti tenaga Penebangan, tenaga tanaman, tenaga persemaian.

Model Kolaborasi proses dimana antar pihak dengan kemampuan yang berbeda saling bekerjasama dalam kelompok menuju tujuan bersama diikat dalam PKS (Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan pengembangan Wisata Bukit Soeharto. Kebermanfaatannya bagi stake Holder Jelas sekali tertuang di dalam PKS yang di buat dan di tanda tangani masing-masing pihak, di dalam nya tercantum Proporsi Bagi hasil dari pengelolaan wisata.

Kolaborasi merupakan bentuk interaksi, diskusi, kompromi, kerjasama yang berhubungan dengan kelompok atau para pihak lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung, sehingga membawa orang-orang dengan latar belakang dan pengalaman kerja yang berbeda secara bersama maka dari sisi ekonomi yang terbelakang bisa belajar dan kemampuan SDM bisa meningkat, bisa berpikir dengan cara baru. Masyarakat dilibatkan dengan wisata Bukit Soeharto. Tiap tahun ada *mou*, diuntungkan kabupaten mendapatkan pajak, Masyarakat sekitar desa Binang, Biting, Badegan, lembaga pemerintah kabupaten, desa mendukung dalam pengembangan Bukit Soeharto

Proses komitmen didasari dari kebutuhan pribadi terhadap kerjasama, kemudian beranjak menjadi kebutuhan bersama, dan rasa memiliki dari para pihak yang bekerjasama. Komitmen awal tujuan dari keberadaan Wisata Bukit Soeharto pemberdayaan masyarakat, tercipta suasana yang harmonis dari masing-masing pihak yang bekerjasama. Tumbuh rasa bangga terhadap lokasi yang tadinya bukan apa-apa menjadi tempat yang pantas di kunjungi sebagai sarana wisata. Awal mulanya sebenarnya sudah lama, pada mulanya kunjungan pah harto pada tahun 1987, dalam rangka reboisasi di lokasi bukit itu ditandai dengan prasasti, sebenarnya sudah lama wisata bukit soeharto ditandai dengan adanya wisata alam, sekitar 1996-1997 rusak karena yang mengelola tidak ada. Presentasi bagi hasil, Perhutani 30%, Desa 10%, Pengelola 60%.

#### 4. Kesimpulan

Proses kolaborasi antara perhutani, desa dan yayasan dilakukan dengan Multi-Colaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Bukit Soeharto Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa, Model kemitraan yang diterapkan di wisata bukit soeharto dengan pihak ketiga yang mana pihak swasta membangun dan mengembangkan fasilitas dalam wisata bukit suharto dengan perjanjian. Salah satu contoh yakni fasilitas dibangun oleh pihak ketiga namun juga dioperasikan oleh pihak swasta dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kontrak yang telah disepakati bersama. Perhutani lewat lmdh dengan pihak ke 3 pengelola bukit soeharto, perhutani 30%, desa 10%, pengelola 60%. Hambatan pengelola wisata bukit soeharto pada waktu covid pemasukan untuk pengelola bukit menurun dan juga pembagian hasil yang kurang merata.

Collaborative governance dalam pengembangan potensi pariwisata di Desa Badegan diyakini sebagai proses kerja yang didasari kerjasama di awal yang dibangun baik itu dalam proses penyediaan prasarana maupun sarana. Dengan begitu, dari pihak swasta hanya terbatas dalam hal pemasaran untuk komoditi yang telah dihasilkan. Adanya perjanjian diawal bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran didalam proses peranan kinerja oleh pihak swasta.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Collaborative Governance dalam pengelolaan wisata bukit soeharto oleh karena itu peneliti menyarankan: Perhutani, pengelola wisata dan Desa harus lebih berperan aktif serta perlu ada regenerasi agar lebih aktif lagi berkolaborasi dalam melakukan pengelolaan, perhutani, pengelola wisata dan Desa harus membangun komunikasi dan melakukan pertemuan. Serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada dikawasan wisata untuk memberikan pemahaman tentang sadar wisata, perhutani, pengelola wisata dan Desa harus lebih meningkatkan lagi proses kolaborasi yang dilakukan agar dapat mengembangkan menjadi lebih baik.

#### Acknowledgment

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung pengerjaan artikel ini hingga selesai.

#### References

- Arrozaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)*. Universitas Airlangga.
- Barus, S. I. P., Patana, P., & Afifuddin, Y. (2013). Analisis potensi obyek wisata dan kesiapan masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Kawasan Danau Linting Kabupaten Deli Serdang. *Peronema Forestry Science Journal*, 2(2), 143–151.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi*, UI-Press. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep Dasar Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, (Edisi Revisi).
- Putri, A. R. (2021). *Proses Collaborative Governance dalam Implementasi Program Konservasi Penyus di Desa Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat*.
- Rosidi, A., & Fajriani, R. A. (2013). *Reinventing government: demokrasi dan reformasi pelayanan publik*. Andi.
- Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(1), 79–96.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Zain, M. R. N. (2014). Kemitraan Antara KPH Perhutani dan LMDH dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jengglunharjo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 210–216.